BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya karena penyidik atau penyidik pembantu Pidum Polres Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sehingga tersangka tindak pidana pembunuhan tidak mendapatkan bantuan hukum dalam menjalani proses penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat dan akhirnya hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi tidak terlindungi.
2. Kendala dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat adalah sumber daya manusia yaitu personil penyidik atau penyidik pembantu Pidum Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat belum memahami dengan baik maksud dari Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sedikitnya ketersediaan pemberi bantuan hukum (penasihat hukum) di Polres Tanjung Jabung Barat sementara banyaknya tersangka yang membutuhkan bantuan hukum dalam menjalani proses penyidikan termasuk tersangka tindak pidana pembunuhan, serta

terbatasnya dana bantuan hukum yang didapatkan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana pembunuhan.

B. Saran

1. Sanksi apabila penyidik tidak menjalankan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebenarnya sudah dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya sanksi dapat dijatuhkan tergantung penilaian hakim apakah harus dikenakan atau tidak. Selain itu sanksi hanya sebatas dikenakan terhadap hasil pemeriksaan perkara pidana bukan kepada penyidik yang melakukan pelanggaran. Untuk membuat efek jera terhadap penyidik yang tidak menjalankan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, hendaknya kedepan dibuat aturan setingkat undang-undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, dimana sanksinya bukan hanya dikenakan terhadap hasil pemeriksaan perkara pidana, tetapi juga sanksi harus dikenakan terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut.
2. Adanya penyuluhan hukum oleh para pakar hukum acara pidana kepada penyidik atau penyidik pembantu Polres Tanjung Jabung Barat mengenai penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP terutama pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Penafsiran pasal yang benar tentunya akan mengaplikasikan pasal tersebut dengan benar pula dan tidak keliru sehingga tersangka menjadi tidak dirugikan.

3. Adanya penyuluhan hukum oleh para pakar hukum acara pidana kepada masyarakat Kabuptaten Tanjung Jabung Barat mengenai hak-hak tersangka dalam KUHAP, termasuk hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.
4. Polres Tanjung Jabung Barat harus meningkatkan kerja sama kepada para penasihat hukum (minimal 7 (tujuh) orang penasihat hukum) dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (tersangka dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP). Sehingga diharapkan pemberian bantuan hukum kepada tersangka tersebut menjadi optimal, termasuk juga kepada tersangka tindak pidana pembunuhan.
5. Hendaknya kedepan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih bijak lagi dalam menentukan besaran dana bantuan hukum untuk penasihat hukum atau pemberi hukum yang menangani perkara tersangka dalam proses penyidikan, hal ini dilakukan agar dana bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan bantuan hukum itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga hendaknya mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar menunjang keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum di daerahnya.